

Judul : Mitigasi ancaman iklim, komisi XII usul proklamasi masuk agenda daerah
Tanggal : Senin, 22 Juni 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Mitigasi Ancaman Iklim Komisi XII Usul Proklamasi Masuk Agenda Daerah

ANGGOTA Komisi XII DPR Ahmad Junaidi Auly mengingatkan, perubahan iklim bukan lagi isu lingkungan semata. Masalah itu telah bertransformasi menjadi ancaman daya tahan ekonomi masyarakat secara nyata seperti merusaknya produktivitas pertanian, ketersediaan air bersih, dan lainnya.

Untuk itu, Junaidi menilai Program Kampung Iklim (ProKlim) dari Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengelola Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) harus memasuki fase baru. Instrumen pembangunan itu wajib mengintegrasikan perlindungan lingkungan dengan partisipasi publik. Itu sekaligus memperkuat kapasitas masyarakat dari tingkat dasar kampung serta komunitas lokal.

Menurutnya, keberhasilan ProKlim tidak lagi diukur hanya dari banyaknya jumlah kampung terdaftar. "Indikator utamanya adalah seberapa besar kemampuan masyarakat menghadapi banjir, kekeringan, kenaikan suhu, ancaman pangan, serta tekanan ekonomi," katanya, Minggu (21/6/2026).

Junaidi mendorong agar pelaksanaan ProKlim disertai kebijakan untuk memperkuat pemerataan kapasitas antardaerah. Pemerintah harus mampu menghadirkan dukungan pendanaan yang memadai, pendampingan teknis secara berkala, serta kolaborasi lintas sektor secara aktif dan berkelanjutan di lapangan.

Menurutnya, ProKlim harus jadi investasi pembangunan yang memperkuat daya tahan masyarakat sejak dari tingkat kampung. Ketika warga semakin siap menghadapi berbagai ancaman risiko perubahan iklim, sesungguhnya Indonesia sedang membangun fondasi ketahanan nasional. "Upaya itu dilakukan secara berkelanjutan langsung dari bawah," katanya.

Senada, Anggota Komisi XII DPR Andi Ridwan Wittiri menegaskan, penguatan ProKlim merupakan langkah strategis untuk membangun ketahanan

masyarakat terhadap dampak perubahan iklim di tingkat lokal. Pasalnya, fenomena alam ini bukan lagi ancaman masa depan melainkan persoalan nyata yang tengah dirasakan langsung masyarakat.

Fenomena perubahan iklim, kata Ridwan, hadir lewat cuaca ekstrem, banjir, kekeringan, hingga penurunan kualitas lingkungan hidup. Karena itu, keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan untuk menghadirkan solusi berkelanjutan. "ProKlim jadi salah satu langkah konkret yang dapat memperkuat kesadaran warga saat menghadapi dampaknya," ujarnya.

Keberhasilan ProKlim, sambung Ridwan, sangat ditentukan oleh aksi nyata masyarakat di tingkat lokal. Langkah konkret mulai dari pengelolaan sampah mandiri, penghijauan lingkungan, hingga konservasi air harus terus ditingkatkan. Transisi menuju penggunaan energi ramah lingkungan juga jadi pilar utama dalam menciptakan kawasan tempat tinggal yang tangguh.

Generasi muda, komunitas lingkungan, serta Pemda diajak untuk terus membangun kolaborasi erat. Isu perubahan iklim harus jadi perhatian bersama karena berkaitan dengan kualitas hidup masa depan. "Kesadaran menjaga alam ini harus dimulai konsisten dari unit terkecil yaitu keluarga dan lingkungan sekitar kita," ucapnya.

Sejalan dengan tujuan itu, Deputi KLH/BPLH Ary Sudijanto ingin memperkuat kapasitas Pemda dalam menyelenggarakan inventarisasi serta pelaporan emisi GRK. Langkah ini memiliki urgensi ekonomi dan reputasi bisnis. Terutama dalam mendukung perdagangan internasional yang menuntut penerapan prinsip ekonomi rendah karbon global saat ini.

Penyelenggaraan inventarisasi GRK subnasional menunjukkan perkembangan positif. Pada 2024 tercatat 29 laporan daerah disampaikan, lalu pertengahan 2025 masuk 12 laporan. ■ **PYB**